

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

##### **1. Bentuk Pengawasan yang dilakukan BPOM terkait Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya Tanpa Nomor Izin Edar di Kota Padang**

Bentuk pengawasan obat dan makanan terhadap kosmetik berbahaya tanpa izin edar sudah diupayakan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kota Padang dan Pemerintah dengan menetapkan peraturan-peraturan yang mengenai pembinaan dan pengawasan berdasarkan keputusan BPOM kota Padang dan Menteri Kesehatan yang telah berupaya melakukan pencegahan kosmetik yang berbahaya tanpa izin edar yang diharapkan bisa membuat para pelaku usaha kosmetik sadar atas tindakan yang diperbuat dan membuat konsumen tidak harus waspada terhadap kosmetik berbahaya tanpa izin edar.

##### **2. Upaya Apakah dilakukan BPOM Mencegah Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya Tanpa Nomor Izin Edar di Kota Padang**

Upaya yang telah dilakukan BPOM kota Padang sudah dilakukan dengan baik dan benar dengan melakukan upaya Preventif dan Pos Market yang dijalankan, dibentuknya sarana- di daerah yang telah dibentuk oleh BPOM kota Padang dalam upaya mencegah peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar di kota Padang.

##### **3. Efektifitas pengawasan peredaran produk kosmetik berbahaya tanpa izin edar di kota Padang**

Efektifitas yang sudah dilakukan BPOM Kota Padang dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar sudah dilakukan dengan semaksimal

mungkin dan seefektif mungkin karena adanya sarana-sarana yang dibuat di daerah yang telah ditetapkan untuk mengawasi kosmetik berbahaya tanpa izin edar .

## **B. Saran**

1. Seharusnya pelaku usaha harus menjalankan usahanya dengan menunjukkan baik dan benar dan memberikan informasi barang yang jelas yang diedarkan ke masyarakat dan berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang telah dibuat oleh Menteri Kesehatan Indonesia dan BPOM kota Padang.
2. Pemerintah dan BPOM kota Padang seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar di kota Padang yang terkandung bahan berbahaya untuk memperkecil kerugian yang diderita oleh konsumen atau masyarakat
3. Penambahan pegawai dibagian pemeriksaan, penyidikan dan pelayanan informasi konsumen, karena jumlah sarana-sarana dan peredaran kosmetik selalu akan bertambah setiap tahunnya maka harus diiringi dengan penambahan jumlah pegawai juga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jenus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus BadrulZaman, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  
No.1176/MENKES/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

### C. Sumber Lainnya

Inspektorat Daerah, 2016, Pengertian Pengawasan  
<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>

Brainly, 2019, Asas Asas Pelaksanaan Pengawasan  
<https://brainly.co.id/tugas/25931037>

Kementrian Keuangan,2020,Peran Pengawasan dalam Kedisiplinan Kerja  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/13454/Peran-Pengawasan-Dalam-Meningkatkan-Kedisiplinan-Kerja-Pegawai>.

Liputan 6,2022,5 Fungsi Pengawasan <https://hot.liputan6.com/read/4857007/5-fungsi-pengawasan-yang-perlu-diketahui-beserta-definisi-dan-jenis-jenisnya>

Bantuanhukum,2021,Asas-asas Perlindungan Konsumen  
<https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-asas-asas-hukum-perlindungan-konsumen>

Faktual.Net,2019,Hak Dan Kewajiban Konsumen <https://faktual.net/hak-kewajiban-konsumen-yang-harus-diketahui/>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitria sebagai Substansi Pengawasan BPOM Padang

Wikipedia,2020,Pengertian Kosmetik ,<https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik>

BeautiHoul,2021,Macam Macam Produk Kosmetik  
<https://www.beautyhaul.com/blog/wajib-tahu-berikut-macam-macam-produk-kosmetik-dan-kegunaannya>

PBC,2007,Tujuan Kosmetik, <https://pintubelajarcerdas.blogspot.com/2017/01/fungsi-kosmetik-pengertian-kosmetik-dan.html>

POPMAMA,2021,7 Kelebihan Dan Kekurangan Penggunaan Kosmetik  
<https://www.popmama.com/life/fashion-and-beauty/syafira-akhtari/kelebihan-dan-kekurangan-menggunakan-kosmetik-share-in-jar>